

**PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, KOMITMEN ORGANISASI  
DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN  
BARANG MILIK NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) SEBAGAI MODERASI  
(Studi Empiris Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : CHRISTIAN DEWABRATA**

**NIM : 127221011**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI**

**2023**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**MAGISTER AKUNTANSI**  
**JAKARTA**

**PERSETUJUAN JUDUL TESIS**

NAMA : Christian Dewabrata  
NIM : 127221011  
PROGRAM / JURUSAN : S2/Magister Akuntansi  
KONSENTRASI : Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan, Sengketa Pajak  
JUDUL TESIS : PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SEBAGAI MODERASI  
(Studi Empiris Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Jakarta, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



(Dr. Amrie Firmansyah, MM., MAk., ME.,  
MH., CSRS., CSRA., CSP.)

# **PENGESAHAN TESIS**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

## **TANDA PENGESAHAN TESIS**

N A M A : Christian Dewabrata

N I M : 127221011

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

## **JUDUL TESIS**

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SEBAGAI MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 11 Januari 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim  
2. Anggota : Amrie Firmansyah  
Estralita Trisnawati



Jakarta, 11 Januari 2024

Pembimbing



---

Amrie Firmansyah

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat serta anugerah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini dibuat dengan tujuan memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Amrie Firmansyah, MM., MAk., ME., MH., CSRS., CSRA., CSP. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan, waktu, tenaga dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Prof. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.Sc., Ph.D. Selaku rektor Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE., MM., M.M., MBA. Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Para Dosen dan Staf Pengajar Universitas Tarumanagara, yang telah membimbing serta mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Sekretaris dan seluruh rekan kerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya kepada penulis untuk mengembangkan diri.

7. Orangtua yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, motivasi serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan tepat waktu.
8. Teman – teman mahasiswa kelas H Magister Akuntansi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu penulis sedari awal perkuliahan hingga selesainya proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam isi, tata bahasa, serta sistematikanya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat bermanfaat bagi penulis dan besar harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan praktisi.

Jakarta, 18 Desember 2023

(Christian Dewabrata)

**PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, KOMITMEN ORGANISASI  
DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN  
BARANG MILIK NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) SEBAGAI MODERASI  
(Studi Empiris Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pegawai, komitmen organisasi, sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara (BMN) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kuisioner disebarakan kepada 205 orang pengelola BMN yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun melalui *google form*. Kuisioner yang telah dikembalikan dengan lengkap berasal dari 114 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) yang mana pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Bootstrapping*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN, sedangkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Selanjutnya pengaruh positif kompetensi pegawai terhadap kualitas pengelolaan BMN dapat diperlemah oleh SPIP, pengaruh positif sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN dapat diperkuat oleh SPIP, namun SPIP gagal memoderasi hubungan komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN.

**Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Pengelolaan BMN**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of employee competence, organizational commitment, information systems on the quality of state property management (BMN) with the Government Internal Control System (SPIP) as a moderating variable at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This research is a quantitative study using a questionnaire as a tool to collect data related to the variables used in the study. Questionnaires were distributed to 205 State Property managers who had more than 1 year of experience via google form. Questionnaires that have been returned completely come from 114 respondents. Data analysis in this study used the Structural Equation Modeling (SEM) method in which hypothesis testing was carried out using the*

*Bootstrapping method. This study concluded that employee competence and information systems have a positive effect on the quality of BMN management, while organizational commitment has no effect on the quality of BMN management. Furthermore, the positive effect of employee competence on the quality of BMN management can be weakened by SPIP, the positive effect of information systems on the quality of BMN management can be strengthened by SPIP, but SPIP fails to moderate the relationship between organizational commitment to the quality of BMN management.*

***Keywords: Employee Competence, Organizational Commitment, Information System, Government Internal Control System, Quality of State Property Management.***

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN JUDUL TESIS .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	12
1.3. Pembatasan Masalah .....	13
1.4. Rumusan Masalah .....	13
1.5. Tujuan Penelitian.....	14
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
2.1. Definisi Konseptual Variabel .....	17
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i> .....	17
2.1.2. Kompetensi Pegawai .....	18
2.1.3. Komitmen Organisasi .....	20
2.1.4. Sistem Informasi.....	22
2.1.5. Pengelolaan BMN.....	25
2.1.6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	26
2.2. Kaitan Antar Variabel.....	29
2.2.1. Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN 29	
2.2.2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN 31	
2.2.3. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN.....	32

2.2.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kompetensi Pegawai Dengan Kualitas Pengelolaan BMN.....	33
2.2.5. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Memoderasi Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dengan Kualitas Pengelolaan BMN.....	35
2.2.6. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Memoderasi Hubungan Antara Sistem Informasi Dengan Kualitas Pengelolaan BMN.....	36
2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	37
2.3.1. Kerangka Pemikiran .....	37
2.3.2. Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Desain Penelitian .....	40
3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel .....	41
3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....	44
3.4. Analisis Validitas dan Reliabilitas.....	47
3.5. Analisis Data .....	50
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	51
3.5.2. Evaluasi Model SEM-PLS.....	51
3.5.3. Pengujian Hipotesis .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1. Deskripsi Subyek Penelitian.....	55
4.2. Deskripsi Obyek Penelitian .....	56
4.3. Hasil Analisis Data .....	57
4.3.1. Uji Validitas.....	57
4.3.2. Uji Reliabilitas .....	60
4.3.3. Uji Kolinearitas.....	62
4.3.4. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	63
4.4. Hasil Uji Hipotesis .....	64
1. H <sub>1</sub> : Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN.....	65
2. H <sub>2</sub> : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN.....	65

3. H <sub>3</sub> : Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN. ....	66
4. H <sub>4</sub> : SPIP dapat memperkuat pengaruh positif kompetensi pegawai terhadap kualitas pengelolaan BMN.....	66
5. H <sub>5</sub> : SPIP dapat memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN.....	66
6. H <sub>6</sub> : SPIP dapat memperkuat pengaruh positif sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN. ....	67
4.5. Pembahasan .....	67
1. Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN....	67
2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN ..	71
3. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN .....	73
4. Pengaruh SPIP Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kompetensi Pegawai Dengan Kualitas Pengelolaan BMN .....	77
5. Pengaruh SPIP Dalam Memoderasi Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dengan Kualitas Pengelolaan BMN.....	78
6. Pengaruh SPIP Dalam Memoderasi Hubungan Antara Sistem Informasi Dengan Kualitas Pengelolaan BMN .....	79
BAB V PENUTUP.....	83
5.1. Kesimpulan .....	83
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 – 2022 .....	3
Tabel 3.1. Sebaran Sampel Unit Pusat .....	43
Tabel 3.2. Sebaran Sampel Kantor Wilayah .....	43
Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....	45
Tabel 3.4. Hasil <i>Pre Test</i> Uji Validitas Kuisisioner .....	48
Tabel 3.5. Hasil <i>Pre Test</i> Uji Reliabilitas Kuisisioner.....	49
Tabel 4.1. Demografi Responden .....	55
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif .....	56
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Indikator Kuisisioner .....	59
Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas.....	60
Tabel 4.5. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) .....	61
Tabel 4.6. Hasil Uji Kolinearitas Variabel.....	62
Tabel 4.7. Hasil Uji Harman’s Single Factor.....	63
Tabel 4.8. Nilai R-Squared dan R-Squared Adjusted .....	64
Tabel 4.9. Uji Hipotesis .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. BMN Kemenkumham Tahun 2017-2022.....	4
Gambar 2.1. COSO Framework dan Perspektif SPIP.....	28
Gambar 2.2. Kerangka Penelitian .....	38
Gambar 3.1. Hasil Ukuran Sampel Minimum Dengan G*Power .....	42
Gambar 4.1. Outer Model .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian .....	101
Lampiran 2. Surat Pernyataan .....	108
Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Turnitin .....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Aset tetap merupakan komponen vital yang umumnya dimiliki oleh entitas pemerintah atau perusahaan. Aset tetap perusahaan berperan kunci dalam menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi laba perusahaan secara positif. Oleh karena itu, nilai dan jumlah aset tetap perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap performa keseluruhan perusahaan. Di sisi lain, aset tetap pemerintah memiliki karakteristik yang mirip dengan aset perusahaan, termasuk tanah, gedung, peralatan, dan lainnya. Namun, penggunaan aset tetap pemerintah tidak terfokus pada pendapatan, melainkan terkait dengan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. (Hasanah & Fauzi, 2017).

Dalam lingkup pemerintahan, salah satu kategori aset yang memiliki peran krusial adalah Barang Milik Negara (BMN). Keberadaan BMN menjadi elemen kunci dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, terutama dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. BMN mencakup segala jenis barang yang diperoleh dengan menggunakan dana dari APBN atau dari sumber perolehan lain yang sah (Republik Indonesia, 2020). Dengan kata lain, perolehan BMN bersumber dari uang rakyat melalui mekanisme APBN.

Aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 *Audited* memiliki nilai Rp 11.454.670.815.794.452, sedangkan total nilai BMN

bersih sebesar Rp 6.637.550.000.000.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa porsi BMN memiliki kontribusi sebesar 58,03% dari total aset pada LKPP 2021 yang telah diaudit (Dhaniarto & Pranawengrum, 2022). Besarnya nilai BMN menuntut pemerintah untuk lebih tertib dan intens dalam melakukan pengelolaan BMN.

Pelaksanaan manajemen Barang Milik Negara (BMN) dibangun di atas enam asas, meliputi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Proses pengelolaan BMN sendiri mencakup serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Republik Indonesia, 2014). Dengan menerapkan pendekatan manajemen yang profesional dan modern, serta mengutamakan prinsip *good governance*, diharapkan pengelolaan BMN dapat memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen keuangan negara (Sudjonggo, 2022).

Dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2022, terungkap bahwa belum seluruhnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Meskipun demikian, pengecualian yang terjadi pada satu LKKL tidak dianggap berdampak material terhadap kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 (DJPb, 2023). Jika melihat opini audit BPK selama lima tahun kebelakang, tahun 2022 merupakan tahun terbaik karena hanya

ada satu Kementerian dan Lembaga yang memperoleh opini WDP. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN tersaji dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 – 2022**

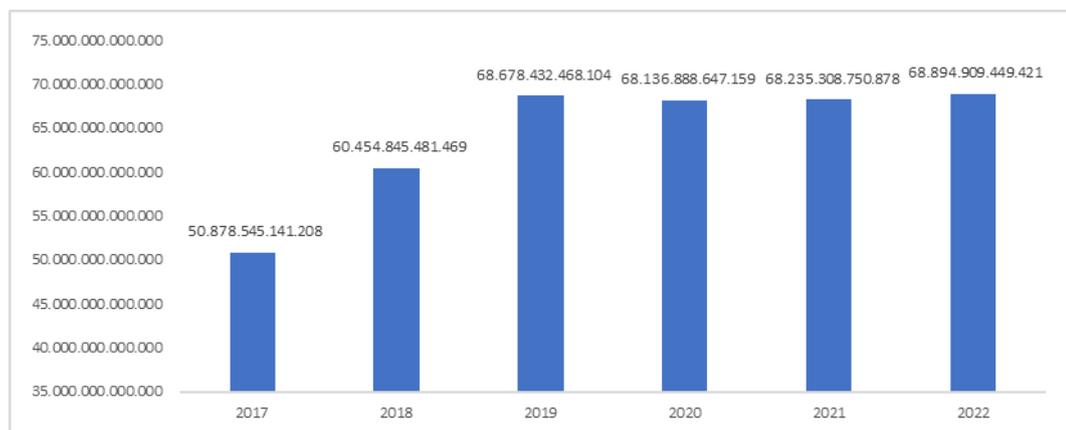
Opini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	82	85	85	84	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	2	2	4	1
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	1	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>83</b>

Sumber: Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2022 (2023)

Namun pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya dari segi laporan keuangan saja, pengendalian internal yang merupakan masalah utama dalam penyusunan laporan keuangan juga menjadi objek pemeriksaan. Temuan dari pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Kelemahan yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpotensi mengurangi keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab pelaksanaan APBN, penting untuk segera menanggapi kelemahan tersebut. Terdapat kelemahan pengendalian internal terkait pengelolaan aset tetap yang berulang setiap tahun, diantaranya pemanfaatan BMN yang melanggar ketentuan, pencatatan BMN yang kurang akurat, dan kurangnya bukti kepemilikan yang sah terkait BMN (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memegang peran penting dalam melaksanakan urusan di bidang hukum dan HAM di Indonesia. Tugas utama Kemenkumham mencakup merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan terkait dengan hukum dan HAM, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungannya. Selain itu, Kemenkumham juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola BMN atau kekayaan negara yang dimilikinya. BMN yang dimiliki dan dikelola Kemenkumham selama 6 (enam) tahun terakhir mulai dari 2017-2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:



**Gambar 1.1. BMN Kemenkumham Tahun 2017-2022**  
Sumber: data diolah

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memberikan opini WTP atas audit Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022. Meskipun Kemenkumham memperoleh opini WTP berturut-turut mulai dari tahun 2017 – 2022, bukan berarti Kemenkumham bebas dari temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Tantangan utama dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham adalah adanya kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap

ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kelemahan dalam pengendalian internal tersebut meliputi kelebihan pembayaran atas belanja modal, adanya denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan, aset tetap berupa tanah yang luas dan nilainya belum menggambarkan kondisi sebenarnya hingga adanya tanah yang belum bersertifikat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Pemerintah pusat bukan satu-satunya yang menghadapi masalah pengelolaan BMN, Pemerintah daerah juga hal serupa. Beberapa permasalahan melibatkan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum sepenuhnya memadai berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi barang, kurangnya upaya inventarisasi BMD oleh pengguna barang dalam periode lima tahun terakhir, ketidakmemadainya pelaporan barang pengguna baik semesteran maupun tahunan, serta rendahnya kinerja dari pengurus BMD (Poedjiyanto, 2019). Kurang optimalnya pengelolaan BMN pada suatu instansi merupakan indikasi adanya pelaksanaan pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya integritas yang dimiliki oleh pengelola BMN/D. Untuk memaksimalkan pengelolaan BMN/D, para pengelola BMN/D harus memiliki sikap integritas yang tinggi (BPKP, 2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas adalah kualitas atau karakteristik yang mencerminkan keseluruhan yang utuh, menunjukkan potensi dan kapabilitas yang mampu menghasilkan kredibilitas atau kejujuran.

Kurang optimalnya penerapan pengendalian internal mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan pengelolaan BMN dengan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta ketidakmampuan

untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pejabat pengelola BMN pada Kemenkumham tentunya memiliki informasi terkait pengelolaan BMN yang lebih banyak daripada pihak lain. Adanya asimetri informasi ini seolah memberikan peluang pejabat pengelola BMN untuk dapat menyesuaikan informasi yang dimilikinya. Pengelolaan BMN dalam hal ini mulai dari perencanaan hingga pengadaan serta penggunaannya selalu dihadapkan dengan masalah klasik yaitu pengadaan BMN yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan tidak adanya kontrol setelah BMN didistribusikan kepada pengguna. Pengadaan BMN yang melenceng dari perencanaan dapat menjadi celah untuk melakukan korupsi, KPK mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa menyumbang lebih dari 70% kasus korupsi di Indonesia (BPKP, 2015). Kurangnya kontrol terhadap penggunaan BMN juga menyebabkan adanya penyalahgunaan terhadap aset negara seperti transfer aset dan penggunaan untuk kepentingan pribadi (BPKP, 2015). Yang disayangkan hal ini masih dianggap lazim dalam instansi pemerintahan meskipun berpotensi pada kerugian negara dan berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan perlunya kualitas pengelolaan BMN diuji lebih lanjut.

Teori *Stewardship* berasal dari keyakinan filosofis tentang karakter manusia yang meyakini bahwa pada dasarnya manusia dapat diandalkan, memiliki kapabilitas untuk bertindak dengan tanggung jawab, dan menunjukkan integritas serta kejujuran terhadap yang lain (Kaihatu, 2006). Teori *stewardship* memandang bahwa masalah integritas sebagai sebuah masalah yang menyebabkan *steward*

mengabaikan kepentingan *stakeholdernya* dalam mencapai kesuksesan bersama. Menurut Amiati (2023) integritas erat kaitannya dengan kinerja seseorang, teori ini menemukan bahwa pengelola organisasi yang memiliki kinerja yang efektif dan efisien dapat mencapai keberhasilan organisasi yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada *stakeholder* dan pengelola organisasi tersebut (Jefri, 2018). Teori *stewardship* pada penelitian ini menempatkan Kemenkumham sebagai pengguna BMN yang harus mengelola BMN dalam penguasaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola yang baik kepada pemangku kepentingannya yaitu masyarakat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam mengelola BMN, faktor internal seperti kompetensi pegawai, komitmen organisasi dan sistem informasi masih menjadi faktor yang sering dilakukan pengujian. Kompetensi pegawai melibatkan penguasaan wawasan, kecakapan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban dengan baik. Tingkat komitmen yang kuat terhadap organisasi dapat memberikan dorongan kepada pegawai untuk menunaikan kewajiban mereka dengan optimal. Sejalan dengan itu, sistem informasi yang efisien dapat memberikan dukungan kepada pegawai dalam aktivitas pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pelaporan informasi secara akurat dan tepat waktu. Artinya kompetensi pegawai yang baik didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi dan sistem informasi yang memadai akan menghasilkan pengelolaan BMN yang berkualitas, termasuk penghematan waktu, sumber daya, dan peningkatan akurasi data BMN.

Sumber daya manusia (SDM) berperan secara krusial dalam struktur organisasi. Keberhasilan tujuan organisasi sangat bergantung pada kemampuan

SDM untuk bekerjasama dan kompetensi yang dimiliki untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing (Abubakar, 2018). Mugiarty et al. (2018) membuktikan bahwa kualitas laporan BMN dapat dipengaruhi oleh kompetensi SDM secara positif. Sejalan dengan penelitian tersebut, Puspitarini et al. (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM mempengaruhi penerapan SAP pada penatausahaan BMN secara positif, selanjutnya Ricardo et al. (2022) dan Belo et al. (2018) juga menyimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMD. Namun menurut Firmansyah & Hollyson (2021), kompetensi pegawai tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Adanya temuan yang tidak seragam, mendorong untuk melakukan evaluasi ulang kompetensi pegawai terkait dengan kualitas pengelolaan BMN dengan memanfaatkan data penelitian yang berbeda.

Dalam konteks yang lebih luas, komitmen organisasi merujuk pada kesepakatan bersama dari seluruh anggota organisasi terkait dengan prinsip, pelaksanaan, dan tujuan yang hendak dicapai bersama di masa mendatang (Muis, Jufrizen, & Fahmi, 2018). Komitmen dalam organisasi menggambarkan tanggungjawab setiap individu kepada organisasi yang menaunginya. Komitmen individu terhadap organisasi sering kali menjadi perhatian penting di lingkungan organisasi. Pentingnya komitmen tersebut dapat dilihat dari keberanian beberapa organisasi untuk mencantumkan persyaratan komitmen sebagai salah satu kriteria dalam iklan lowongan pekerjaan untuk posisi yang ditawarkan (Muis, Jufrizen, & Fahmi, 2018). Pengujian yang dilakukan terhadap komitmen organisasi menunjukkan hasil yang beragam, Firmansyah & Hollyson (2021)

mengemukakan bahwa kualitas pengelolaan BMN tidak dipengaruhi oleh komitmen organisasi karena pegawai lebih memilih fokus pada tugas dan fungsi inti instansi daripada tanggung jawab tambahan seperti pengelolaan BMN. Penelitian oleh Ekayanti et al. (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi justru memiliki pengaruh negatif terhadap keefektifan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di sisi lain, Gunawan et al. (2017) dan Rosihan et al. (2017) menghasilkan temuan yang berbeda yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan BMD dipengaruhi oleh komitmen organisasi secara positif. Dengan adanya variasi hasil dari penelitian sebelumnya, diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai dampak komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN dengan menggunakan data yang berbeda.

Sistem dalam suatu organisasi dikenal sebagai sistem informasi. Sistem ini mengintegrasikan kebutuhan pengolahan transaksi rutin untuk mendukung operasi manajerial dan kegiatan strategis, sehingga organisasi dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal (Sutabri, 2012). Sistem informasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pihak eksternal saja, sistem informasi juga menyediakan informasi bagi manajemen organisasi untuk dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasi organisasi. Kualitas sistem informasi tidak selalu dinilai dari aspek perangkat dan hasil akhirnya, tetapi juga bergantung pada kelengkapan serta validitas data *input* yang digunakan. *Output* yang dihasilkan oleh sistem mencerminkan tingkat keakuratan dan kelengkapan data *input* yang benar (Firmansyah & Hollyson, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apapun sistem informasi yang dimiliki suatu organisasi tidak

otomatis memberikan informasi yang berkualitas, semua tergantung pada *input* yang diberikan. Penelitian mengenai sistem informasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Belo et al. (2018) mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan BMD. Namun penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Hollyson (2021), membuktikan bahwa kualitas pengelolaan BMN dapat dipengaruhi oleh sistem informasi secara positif. Mendukung hasil dari Firmansyah & Hollyson (2021) dan Ekayanti et al. (2018), Rosihan et al. (2017) juga menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap keefektifan manajemen aset pemerintah daerah. Dengan bervariasinya hasil pengujian terkait sistem informasi, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan objek dan data yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi pegawai, komitmen organisasi dan sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN dengan SPIP sebagai variabel pemoderasi. Penelitian terkait kualitas pengelolaan BMN sebelumnya diuji menggunakan variabel yang berbeda yaitu kapital intelektual dan penerapan prinsip tata kelola yang baik yang menunjukkan pengaruh positif signifikan variabel-variabel tersebut terhadap manajemen aset tetap (Awaludin, Suharman, & Fitriyah, 2018). Variabel lain yang digunakan untuk menguji kualitas pengelolaan BMN adalah kinerja pegawai dengan indikator transparansi, efisiensi, akuntabilitas dengan hasil penelitian bahwa kinerja pegawai dalam melakukan pengelolaan BMN masih berada di posisi cukup (Sahetapy, 2022).

Perbedaan selanjutnya pada penelitian ini adalah menempatkan SPIP sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai, komitmen organisasi dan sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN. SPIP mencakup serangkaian langkah-langkah dan aktivitas yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh para pimpinan dan semua anggota organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya keyakinan yang wajar terkait dengan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Fokus utama SPIP mencakup keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Republik Indonesia, 2008). Peran SPIP sangat penting, hal ini menjadi dasar *guidance* bagi pengelola (*steward*) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN melalui kompetensi pegawai, komitmen organisasi dan sistem informasi yang dimilikinya. Pada penelitian terdahulu, SPIP sebagai variabel independen diuji bersama dengan variabel SDM terhadap pengamanan aset negara dengan hasil SPIP BMN dan SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pengamanan aset negara (Hamidah & Syofyan, 2014). Penelitian lainnya menguji SPIP, pemahaman regulasi dan SI terhadap manajemen aset dengan hasil SPIP, pemahaman regulasi dan SI berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap manajemen aset (Mainar, Darwanis, & Abdullah, 2017). Selanjutnya penelitian SPIP sebagai variabel independen juga dilakukan oleh Subrata et al. (2018) dengan hasil SPI, kemampuan SDM dan pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan BMD. Pengujian terkait SPIP

sebagai variabel independen sudah banyak dilakukan, namun baru sedikit penelitian yang menjadikan SPIP sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyusunan program kerja, prosedur kerja dan prodesur pengawasan yang lebih komprehensif dan relevan di lingkungan Kemenkumham sehingga mampu menciptakan pengelolaan BMN yang tertib hukum, administrasi dan fisik, serta dapat memberikan dukungan dan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan referensi tambahan terkait dengan topik akuntansi sektor publik khususnya dalam konteks Indonesia.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Kurang optimalnya pengelolaan BMN hampir terjadi pada seluruh instansi pemerintah tidak terkecuali Kemenkumham. Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pengadaan BMN, lemahnya pengamanan dan pengawasan BMN, serta kurangnya inventarisasi menyebabkan pengelolaan BMN pada Kemenkumham kurang optimal. Hal-hal tersebut dapat memicu tindakan oportunistik bagi pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini akan memberikan peluang untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan individu dan mengesampingkan tujuan bersama organisasi. Kompetensi pegawai, komitmen organisasi, sistem informasi dan SPIP nampaknya bertanggungjawab terhadap hal ini. Kemampuan pengelola BMN yang kurang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, adanya intervensi pimpinan dalam pengelolaan BMN, SOP dan sistem informasi yang belum memadai serta lemahnya pengendalian

internal dan pengawasan dalam pengelolaan BMN dapat menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan BMN pada Kemenkumham.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada:

1. Penilaian terhadap kompetensi pegawai, komitmen organisasi, dan sistem informasi dalam kualitas pengelolaan BMN Kemenkumham dengan peran SPIP sebagai variable moderasi. Rendahnya kualitas pengelolaan BMN akan berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan. Pengelolaan BMN merupakan salah satu ukuran yang menggambarkan kemampuan Kemenkumham dalam mengelola kekayaannya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan Kemenkumham.
2. Cakupan penyebaran kuisisioner dilakukan pada seluruh pengelola BMN Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
3. Penulis tidak dapat memastikan apakah kuisisioner akan sepenuhnya ditanggapi oleh responden.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN?

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN?
4. Apakah SPIP dapat memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan kualitas pengelolaan BMN?
5. Apakah SPIP dapat memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan kualitas pengelolaan BMN?
6. Apakah SPIP dapat memoderasi hubungan antara sistem informasi dengan kualitas pengelolaan BMN?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris peran kompetensi pegawai terhadap kualitas pengelolaan BMN.
2. Menguji secara empiris peran komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN.
3. Menguji secara empiris peran sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN.
4. Menguji secara empiris peran SPIP dalam memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan kualitas pengelolaan BMN.

5. Menguji secara empiris peran SPIP dalam memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan kualitas pengelolaan BMN.
6. Menguji secara empiris peran SPIP dalam memoderasi hubungan antara sistem informasi dengan kualitas pengelolaan BMN.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dan teoritis, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a) Berkontribusi bagi pembuat kebijakan terkait dengan penyusunan program kerja, prosedur kerja dan prodesur pengawasan yang lebih komprehensif dan relevan khususnya di lingkungan Kemenkumham sehingga mampu menciptakan pengelolaan BMN yang tertib hukum, administrasi dan fisik, serta dapat memberikan dukungan dan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan.
- b) Melihat SPIP sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan atau peningkatan SPIP di Indonesia khususnya pada bidang pengelolaan BMN.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a) Memberikan kontribusi signifikan dengan mengintegrasikan kompetensi pegawai, komitmen organisasi, dan sistem informasi sebagai variabel-

variabel kunci yang memengaruhi kualitas pengelolaan barang milik negara.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan dan menyediakan referensi tambahan terkait dengan topik akuntansi sektor publik khususnya dalam konteks pengelolaan barang milik negara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) : Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Abubakar, R. R. (2018). Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(1), 17-32.
- Aini, K. (2023). *DAMPAK PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Al Hakim, Y. R. (2022). Analisis Pengaruh Iklim Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 456-460.
- Albar, T. M., & Fitri, F. A. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, ETIKA ORGANISASI, KEADILAN KOMPENSASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FRAUD (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 527-537.
- Amiati, M. (2023, 17). *Artikel: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*. Retrieved from Kejaksaan Tinggi Jawa Timur: <https://kejati-jatim.go.id/integritas-sebagai-kunci-keberhasilan-kinerja/>

Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Arifin, N. Y., Borman, R. I., Ahmad, I., Tyas, S. S., Sulistiani, H., Hardiansyah, A., & Suri, G. P. (2021). *Analisa Perancangan Sistem Informasi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Astini, Y. (2018). KUALITAS APARATUR, SISTEM INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN ASET TETAP. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 173-184.

Aviana, P. M. (2012). Penerapan Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(4), 65-70.

Awaludin, I., Suharman, H., & Fitriyah, F. K. (2018). Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pengelolaan BMN Terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(2), 174-186.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020, 9 8). *BPK TEKANKAN PENTINGNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA*. Retrieved from bpk.go.id: <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tekan-pentingnya-pengelolaan-barang-milik-negara>

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan*

*Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022, 6 15). *LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021 MEMPEROLEH OPINI WTP*.  
Retrieved from bpk.go.id: [https://www.bpk.go.id/news/laporan-keuangan-  
pemerintah-pusat-tahun-2021-memperoleh-opini-wtp](https://www.bpk.go.id/news/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-tahun-2021-memperoleh-opini-wtp)

Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang  
Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan BMN Kabupaten Waropen Dengan  
Komitmen Pimpinan Sebagai Moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*,  
1(2), 01-33.

BPKP. (2015). Warta Pengawasan. *Peran Pengawasan Intern Mengamankan Aset  
Negara*, XXII(8).

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation  
modeling. *Advances in Hospitality and Leisure*, 8 (2) (January 1998), 295–  
336. <https://psycnet.apa.org/record/1998-07269-010>

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed  
Methods Approaches*. Singapore: Sage Publications.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship  
Theory Of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.

Dhaniarto, A. Y., & Pranawengrum, R. (2022, 10 28). *Article: Implementasi  
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebagai Penguatan Good Governance*

*dalam Pengelolaan BMN*. Retrieved 4 11, 2023, from DJKN Kementerian

Keuangan:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15584/Implementasi-Indeks-Pengelolaan-Aset-IPA-sebagai-Penguatan-Good-Governance-dalam-Pengelolaan-BMN.html>

DJKN. (2015, Desember 10). *Berita DJKN: SIMAN Memberikan Kemudahan*

*Dalam Pengelolaan BMN*. Retrieved from DJKN:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/9365/SIMAN-Memberikan-Kemudahan-Dalam-Pengelolaan-BMN.html>

DJKN. (2023, 5 31). *Menuju Penatausahaan BMN yang Lebih Baik Untuk*

*Mendukung Kinerja Pengelolaan Aset yang Optimal*. Retrieved from

Kementerian Keuangan Republik Indonesia:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bima/baca-artikel/16166/Menuju-Penatausahaan-BMN-yang-Lebih-Baik-Untuk-Mendukung-Kinerja-Pengelolaan-Aset-yang-Optimal.html>

DJPB. (2022, Juli 26). *Data Publikasi: Overview SAKTI Web*. Retrieved from

DJPB: [https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html#:~:text=Sistem%20Aplikasi%20Keuangan%20Tingkat%20Instansi,tahapan%20perencanaan%20hingga%20pertanggungjawaban%20anggaran.)

[sakti/overview-sakti-](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html#:~:text=Sistem%20Aplikasi%20Keuangan%20Tingkat%20Instansi,tahapan%20perencanaan%20hingga%20pertanggungjawaban%20anggaran.)

[web.html#:~:text=Sistem%20Aplikasi%20Keuangan%20Tingkat%20Instansi,tahapan%20perencanaan%20hingga%20pertanggungjawaban%20anggaran.](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html#:~:text=Sistem%20Aplikasi%20Keuangan%20Tingkat%20Instansi,tahapan%20perencanaan%20hingga%20pertanggungjawaban%20anggaran.)

- DJPb. (2023, 6 20). *Berita: LKPP Tahun 2022 Kembali Raih Opini WTP dari BPK*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI:  
<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4138-lkpp-tahun-2022-kembali-raih-opini-wtp.html>
- Ekayanti, S. M., Rifa'i, A., & Irwan, M. (2018). Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research(IJBMER)*, 9(1), 1219-1229.
- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 06(02), 177-193.
- Gunawan, H., Haming, M., Zakaria, J., & Djamareng, A. (2017). Effect of Organizational Commitment, Competence and Good Governance on Employees Performance and Quality Asset Management. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, 08(01), 17-30.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Hampshire: Annabel Ainscow.
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Los Angeles: Sage.

- Hamidah, R. T., & Syofyan, H. E. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengamanan Aset Negara (Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-19.
- Hardyansyah, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 41-65.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS, LISREL, PLS*. Bekasi: Badan Penerbit PT. Intermedia Personalia Utama.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Hery. (2015). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hussein, A. S. (2015). *Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Malang: FEB Universitas Brawijaya.
- Hutahaean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. IAI.

- Izzati, A. K. (2023). *PENGARUH TEKANAN, PELUANG, RASIONALISASI DAN KAPABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI, 4(003)*, 14-28.
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8(1)*, 1-9.
- Kang, H. (2021). Sample size determination and power analysis using the G\*Power software. *Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18(17)*, 1–12. <https://doi.org/10.3352/JEEHP.2021.18.17>
- Kemenkumham. (2021). *Rencana Strategis TA. 2020 - 2024 Inspektorat Jenderal*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
- Kemenkumham. (2023). *Laporan Barang Pengguna 2022 Audited*. Jakarta.
- Kuangan, B. P. (2023). *Ringkasan Eksekutif*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Kock, N., & Lynn, G. S. (2012). Lateral Collinearity and Misleading Results in Variance-Based SEM: An Illustration and Recommendations. *Journal of the Association for Information Systems, 13(7)*, 546-580.

- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi* (3rd ed.). Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Kustianingsih, E., & Setiadi, P. B. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 3448-3455.
- Leatemia, S. Y., & Febryanti, N. F. (2020). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon). *ARIKA*, 14(1), 15-22.
- Lubis, E. A. (2023). EFEKTIVITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), 1-24.
- Mainar, Darwanis, & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(1), 41-50.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mugiarty, L., Ritchi, H., & Pratama, A. (2018). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan

- Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara.  
*Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 261-274.
- Muis, M. R., Jufrizen, J., & Fahmi, M. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 1(1), 9-25.
- Nasrudin, E. (2015). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 45-56. doi:<https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1878>
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Nur Savitri, A. S., Mutohar, & Kabib, N. (2020). PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DALAM PERSPEKTIF ‘‘COSO’’ DI DESA KALIKURMO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG. *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 01(08), 1-11.
- Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: problems and prospects. *Journal of Management*, 12(4), 531–544. <https://doi.org/10.1177/014920638601200408>
- Poedjiyanto, A. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Di badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Universitas Medan Area*.
- Pramularso, E. Y. (2018). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta. *Widya Cipta*, 11(1), 40-46.

- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141-149.
- Putri, G. Y. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri padang*, 1(1), 1-23.
- Rahma, T. U. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Rekonsiliasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Ricardo, Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat

- Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 12(1), 74-81. doi:DOI:10.37859/jae.v12i1.3325
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). *Organizational Behavior*. Pearson Prentice Hall.
- Rosihan, Bharranti, B. E., & Ratang, W. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Pemerintah Provinsi Papua). *Jurnal Keuda*, 2(1), 1-16. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/217583-pengaruh-kualitas-aparatur-daerah-regula.pdf>
- Sahetapy, P. (2022). Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. *Journal Administration and Public Service*, 3(1), 27-35.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Sinaga, A. V. (2011). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Studi Kasus Pada Pengelolaan Aset di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, I. B. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan barang Milik Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(2), 477-508.
- Sudipa, I. I. (2023). *Penerapan Sistem Informasi di Berbagai Bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sudjongo. (2022, September 13). *Berita Utama: Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia* . Retrieved from Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia : <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pengelolaan-bmn-secara-profesional-dorong-peningkatan-pengelolaan-keuangan-negara>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, Haryono, A. T., & Warso, M. M. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Organizational

- Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Karyawan PT. Fumira Semarang). *Journal of Management*, 4(4).
- Tewal, B., Adolfini, Pandowo, M. C., & Tawas, H. N. (2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja* (3th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Widari, L., & Sutrisno. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(10), 117-126.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1290-1307.
- Yusuf, R. M., & Syarif, D. (2018). *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi dan Mempengaruhi*. Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka.